

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi tinggi, dengan perkembangan ekonomi dimata dunia saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya (Indonesia Investmen, 2017). Hal ini didorong karena adanya kesepakatan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang mulai berlaku pada januari 2016 sehingga berdampak pada sektor ekonomi. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi seperti berdirinya badan usaha yang ada di Indonesia salah satunya badan usaha yang bersifat sosial yaitu organisasi nirlaba. (Tinungki dan Pusung, 2014).

Organisasi nirlaba mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat yang tanpa disadari semakin banyak keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bermunculan sekolah-sekolah swasta baik yang berskala nasional maupun internasional. Masyarakat Indonesia yang kebanyaka tidak dapat merasakan pendidikan karena ekonomi yang tidak mencukupi, maka dengan kehadiran organisasi nirlaba dapat membantu masyarakat untuk dapat menikmati dunia pendidikan. (Sulistiyoningsih dan Riharjo, 2013).

Hingga awal tahun 2014 jumlah organisasi nirlaba berbentuk yayasan yang bedomisili di Jakarta menurut Jakarta Open Data berjumlah 380 yayasan dari berbagai bidang diantaranya bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Kemunculan yayasan masih dianggap tabu oleh masyarakat, hal ini karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang organisasi yang bersifat nirlaba.

Hakikatnya yayasan didirikan adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan, yayaan yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak berorientasi pada pencarian laba atau kekayaan semata. Saat ini yayasan sulit dibedakan dengan lembaga lain yang berorientasi pada laba. Bentuk hukum yayasan dijadikan payung untuk menyiasati

aktivitas diluar bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan sehingga menjadi sorotan dari berbagai pihak.

Berbagai fakta menunjukkan bahwa pendirian yayasan cenderung adalah untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan, bukan sebagai wadah pengembangan bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan, tujuan dari kecenderungan pendirian yayasan ini biasanya berakhir untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus dan Pengawas yayasan.

Sejalan dengan kecenderungan dalam pendirian yayasan memunculkan berbagai masalah pada yayasan, seperti kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar yayasan, dugaan bahwa yayasan digunakan sebagai tempat untuk menampung kekayaan para pendiri atau pihak lain yang diperolehnya dengan cara melawan hukum sehingga dapat merugikan masyarakat maupun negara. Seperti kasus yang pernah terjadi pada Yayasan Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit (YKPP) tersandung kredit macet dengan kerugian senilai Rp410 milyar yang melibatkan beberapa petinggi militer (Detiknews, 21 Maret 2006). Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Buloggate yang merugikan Negara senilai Rp35 milyar yang terjadi pada masa awal pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kasus ini mengantarkan Gus Dur lengser pada 2001 (Republika, 3 oktober 2014). Dan kasus Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK) Joko Djandra memberikan uang kepada Dirut PT Mulia Viadi senilai US\$ 1 juta, uang yang diterima dialirkan lagi ke YKDK. Setelah ditelusuri, YKDK dibina oleh mantan Kasau juga mantan Panglima TNI Djoko Suyanto, Mantan Kapolri Jendral Sutanto, Mantan Mentri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat. Sementara Ketua Umum YKDK adalah petinggi Bank CIMB Niaga dan mantan Dirut Telkom Arwin Rasyid. (Metrotvnews.com Juni 2017).. Alih-alih membantu dalam bidang sosial kemanusiaan yayasan tersebut justru melenceng dari tujuannya semula dan dijadikan sebagai mesin pencuci uang dengan tujuan untuk mensejahterakan pemiliknya.

Lantas apakah dalam prakteknya yayasan tidak boleh menjalankan kegiatan yang bersifat komersil? Mungkin saja, tetapi jika yayasan tersebut menghasilkan laba maka jumlahnya tidak akan dibagikan kepada para pendiri atau anggota

yayasan tersebut namun akan digunakan untuk biaya operasional yayasan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan organisasi nirlaba dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tahun 2017 sebagai berikut:

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan atau manfaat ekonomi yang sebanding dari organisasi tersebut (PSAK No. 45, 2010 hlm. 45.1).

Dana yang diterima yayasan berasal dari pemberi yang tidak mengharapkan imbalan atau yang tidak mengharapkan manfaat ekonomi yang sama besarnya dengan jumlah yang diberikan. Maka dalam yayasan terdapat beberapa transaksi yang jarang atau bahkan tidak ditemukan pada organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan (PSAK 45, 2017 hlm. 2). Banyak yang belum mengetahui bahwa sebenarnya laporan keuangan organisasi nirlaba pada yayasan sebenarnya berbeda dengan organisasi bisnis, itu karena pada praktiknya yayasan sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga sulit dibedakan dengan organisasi bisnis.

Di Jakarta terdapat berbagai macam jenis yayasan dan setiap yayasan bentuk sumber daya yang diterimanya berbeda dan berbeda pula dalam pelaporannya karena disesuaikan dengan bentuk yayasan tersebut. Seperti pada Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) yang berlokasi di Kwitang, Jakarta Pusat dengan tujuan didirikannya adalah untuk mewujudkan kelayakan dan kesejahteraan Pendidikan, Bantuan Sosial dan Bantuan Uang Muka (BUM) untuk prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiunan PNS, Kemhan, TNI dan Polri. Sumber dana utama yang diterima bukan dari donatur melainkan dari bidang yang dikelola oleh yayasan seperti saat dilakukannya pra-peneitian dinyatakan oleh Bapak Danang bahwa sumber pendapatan yayasan dari bidang pendidikan adalah dari mahasiswa, sedangkan untuk bidang investasi dari hasil investasi yang dikelola. (Pra-penelitian 19 Oktober, 2017).

Sama halnya seperti yang pra-penelitian yang dilakukan pada Yayasan Abdi Karya (Yadika) yang berlokasi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang bergerak dibidang pendidikan yaitu mengelola sekolah Yadika yang berada di 7 provinsi di Indonesia, dan bidang kesehatan yang mengelola rumah sakit maupun apotik

Yadika. Ibu Astri menyatakan bahwa pendapatan utama yang diperoleh adalah dari bidang yang dikelola oleh yayasan seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Astri bahwa sumber pendapatan utama yang diterima oleh yayasan adalah dari unit pendidikan, iuran SPP siswa setiap bulan, uang pangkal maupun kegiatan lain yang diselenggarakan oleh unit. (Pra-Penelitian 20 November, 2017).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yayasan mengenai kemampuannya dalam mengelola dana yang diterima maka disampaikan melalui laporan keuangan yang dibuat pada suatu periode tertentu, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja yayasan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan.

Yayasan wajib menyampaikan pertanggungjawabannya sebagai wujud akuntabilitas. Akuntabilitas berperan penting dalam yayasan guna meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan satu sama lain antar yayasan dan masyarakat (Randa, 2014). Akuntabilitas bukan hanya harus dipahami oleh yayasan saja tetapi menjadi hak bagi masyarakat umum yang akan berhubungan dengan suatu yayasan, seperti donatur yang akan memberikan sumbangan pada yayasan. Keterbukaan yang ditunjukkan yayasan dapat menjadi umpan balik bagi para donatur, pemerintah dan antar yayasan dalam membantu kegiatan yayasan.

Bentuk akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengurus wajib menyusun laporan keuangan secara tertulis sebagaimana pada pasal 49 Ayat (1) UU Yayasan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Danang dalam pra-penelitian pada Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) menyatakan bahwa dalam menghasilkan sebuah laporan keuangan melalui beberapa tahap yang diawali dengan penyusunan rencana anggaran yang disebut dengan PKRA (Perencanaan Kebutuhan Rencana Anggaran) yang disusun oleh masing-masing bidang yayasan diantaranya UPN Veteran, SMA Taruna Nusantara dan bidang investasi, hingga dilaksanakannya kegiatan dan dilakukan penyusunan laporan keuangan. YKPP telah menyusun laporan keuangan secara tertulis yang telah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45.

Sudah sesuai, ya walaupun ada sedikit item yang masih belum sesuai dengan PSAK 45, walaupun masih ada beberapa item yang belum dapat diterapkan seperti basis kas yang masih digunakan oleh UPN maupun yayasan. (Manuskrip: IP.1 Wawancara 18 Oktober, 2017).

Penerapan PSAK 45 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia mengharapkan untuk menerapkan akrual basis pada setiap transaksi dan dalam penyusunan laporan keuangannya, namun dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa entitas yang dalam melakukan pelaporan keuangan yang belum dapat menerapkan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Publik) dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Seperti yang diterapkan pada Kementerian Keuangan yang masih menerapkan basis kas dalam penyusunan laporan keuangannya sehingga berpengaruh pada YKPP yang juga menerapkan basis kas dalam penyusunan laporan keuangannya, karena YKPP berpedoman pada Kementerian Keuangan dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disusun oleh YKPP diantaranya laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan perubahan aset neto.

Namun pada penelitian terdahulu masih banyak yayasan yang belum dapat menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar dengan hasil penelitian yang memiliki alasan berbeda-beda, seperti penelitian yang dilakukan Gultom dan Poputra (2015) yang melakukan penelitian pada Kantor Sinode GMIM yang menunjukkan bahwa Kantor Sinode GMIM hanya menyusun laporan realisasi anggaran belanja dan pendapatan disusun berdasarkan tata gereja GMIM. Yuliarti (2014) pada Yayasan Panti Asuhan Yabappentim Jember hanya membuat laporan keuangan neraca sederhana dan laporan sumber dan pendayagunaan dana. Tinungki dan Pusung (2014) melakukan penelitian pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana yang hanya membuat laporan pengeluaran, laporan realisasi dan laporan posisi kas sesuai dengan pemahaman paengurus panti. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang menyatakan bahwa YKPP telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 namun masih ada beberapa item yang belum dapat diterapkan oleh YKPP dan perbedaan terhadap hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana

akuntabilitas informasi keuangan yayasan dalam mengkomunikasikan dana yang diterima dan dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan dengan judul **“Akuntabilitas Informasi Keuangan Organisasi Nirlaba (Pada Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dan Yayasan Abdi Karya (Yadika))”**

I.2 Fokus Penelitian

Karakteristik utama organisasi nirlaba seperti yayasan berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi pada laba, perbedaannya terletak pada bagaimana yayasan tersebut memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, yang biasanya diperoleh dari sumbangan.

Akuntabilitas informasi keuangan yayasan mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh yayasan, namun dalam penelitian ini difokuskan mengenai bentuk akuntabilitas yayasan hanya dalam mengelola dana yang diterimanya dan dikomunikasikan melalui laporan keuangan yang disusun secara tertulis oleh yayasan. Informasi akuntansi yang dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan sangat diperlukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak. Maka laporan keuangan yayasan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No 45.

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada objek pelaku, yaitu bagian keuangan YKPP dan Yadika untuk pencarian makna berdasarkan pengalaman pelaku. Kegiatan yang dilakukan oleh bagian keuangan dipengaruhi oleh keadaan yayasan, kebijakan yayasan dan pengetahuan pelaku, sehingga berdampak pada hasil akuntabilitas informasi keuangan yang disusunnya. Berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana proses akuntabilitas informasi keuangan organisasi nirlaba pada Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dan Yayasan Abdi Karya (Yadika)?

I.3 Perumusan Masalah

Bagaimana akuntabilitas informasi keuangan organisasi nirlaba pada Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dan Yayasan Abdi Karya (Yadika)?

I.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas informasi keuangan organisasi nirlaba pada Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dan Yayasan Abdi Karya (Yadika)

I.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengenai akuntabilitas informasi keuangan organisasi nirlaba pada yayasan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang selanjutnya mengenai akuntabilitas informasi keuangan organisasi nirlaba pada yayasan.

2) Bagi Yayasan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi yayasan untuk mengembangkan penyusunan keuangan yayasan agar lebih akuntabel.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terkait dengan akuntabilitas informasi keuangan yayasan.